

UPAYA ORGANISASI SOSIAL MENGANGKAT MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN

***(NGOs and the Poverty Eradication through Empowerment
Program)***

**—Karakteristik Organisasi Sosial di Palembang,—
Sumatera Selatan**

Indah HURUSWATI

ABSTRACT

One among social participation forms within social welfare development can be seen in social organization or non-governmental organization. Social organization \ non-governmental organization is government partner on solving social problems. As a dynamic partner, hopefully, those social organization enable to be self help both in fund and management. It is also hoped that they have ability on motivate and encourage social participation. NGOs role on conducting social welfare program, in one hand, is seen as significant on helping grass root level society. On the other hand, they almost dependent both in program and fund. In the future, hopefully, NGOs no more depended on Government, especially on conducting social welfare development. The NGOs should free from their dependency of government organization both horizontally and vertically. Hence they enable to help grass root level society in responding social actual needs. Hopefully, NGOs program is not only in terms of charity and rehabilitation but also copes motivation processes, assistance, development, advocacy and all activities in empowering society.

I. PENDAHULUAN

SEBELUM Indonesia terperosok ke dalam krisis ekonomi, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan "hanya" 22,5 juta. Oleh karena pemerintahan Orde Baru gagal menanggulangi krisis ekonomi, maka jumlah orang miskin membengkak menjadi 78,9 juta. Keadaan ini memaksa Soeharto, lengser keprabon. Ini adalah angka kemiskinan versi BPS.

Ada kemungkinan angka kemiskinan versi BPS terlalu kecil, apalagi bila pengukuran kemiskinan itu menggunakan patokan pengeluaran rumah tangga "ekuivalen nilai tukar beras" (dalam kg/orang/bulan). Bila mengacu pada tulisan Prof. Dr. Sajogyo, "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan" (Yogyakarta, Aditya Media, 1996), maka yang digolongkan miskin adalah orang yang pengeluaran rumahtangganya sama dengan, atau di

bawah 320 kg/orang/tahun untuk perdesaan, dan 480 kg/orang/tahun untuk perkotaan.

Karena data dalam laporan itu diperoleh pada tahun 1996, saat Indonesia belum terpuruk dalam krisis ekonomi, maka sudah selayaknya perlu disimak dengan lebih hati-hati. Salah satu rambu kehati-hatian yang diperlukan adalah keadaan Indonesia saat ini yang ditandai dengan meroketnya harga, sedangkan pendapatan penduduk merosot yang antara lain disebabkan oleh banyaknya orang yang terkena PHK.

Melihat kondisi demikian, masyarakat rentan tampaknya membutuhkan pelayanan sosial yang lebih bersifat penguatan potensi, hal ini juga melihat bahwa kini persaingan dalam dunia usaha dirasakan semakin ketat. Masa mendatang perlu partisipasi masyarakat, tidak hanya tergantung pemerintah, tetapi juga dibutuhkan peran masyarakat antara lain melalui Organisasi Sosial/LSM.

Sementara dengan tuntutan demikian, Orsos saat ini perlu dilihat sebagaimana perannya sebagai mitra kerja pemerintah, jenis Orsos yang dalam upayanya memberikan pemberdayaan masyarakat, bagaimana sasaran kerjanya, bagaimana kinerja dan bagaimana hasil yang telah dicapai selama ini. Masyarakat kini makin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Yang diperlukan saat ini adalah suatu strategi atau arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan.

Orsos mendatang harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk dapat memperkuat potensi melalui pemberdayaan. Sifatnya tidak lagi karikatif tentunya. Oleh karenanya, untuk mencapai hal itu diperlukan orsos yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu, agar dapat diakui keprofesionalannya dalam memberikan pelayanannya. Orsos/LSM paling tidak, harus memenuhi standard yang telah ditentukan, sekaligus juga memudahkan pemberian pembinaan terhadap Orsos/LSM yang bersangkutan.

II. PENGERTIAN TENTANG ORGANISASI SOSIAL

Organisasi sosial merupakan suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Kepmensos R.I. No. 40/HUK/KEP/X/1980). Selama ini kedudukan dan peranan Orsos merupakan jembatan yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat sebagai mitra pemerintah yang berfungsi menjalankan program-program kegiatan sesuai strategi dan perencanaan program-program pembangunan pemerintah.

Di dalam pelaksanaan kegiatannya Orsos/LSM seharusnya mampu menghasilkan strategi-strategi yang dapat menciptakan terwujudnya hubungan-hubungan yang seimbang, serasi dan selaras di antara pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan. Orsos/LSM harus dapat memikirkan kepentingan masyarakat yang bersangkutan dan melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pembangunannya.

Oleh karenanya suatu organisasi sosial haruslah memiliki ciri sebagai berikut :

1. Muncul dan diorganisasi kegiatan-kegiatannya secara sukarela oleh para anggotanya karena kepedulian sosial, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Visi yang melandasi kegiatan-kegiatannya adalah ide atau filosofi tentang kemajuan dan perkembangan, yaitu untuk hari esok yang lebih baik.
3. Bukan dan tidak pernah menjadi milik pribadi, kumpulan pribadi atau bagian dari lembaga-lembaga pemerintah atau organisasi pemerintahan; dan juga bukan merupakan bagian dari partai politik ataupun organisasi kepartaian politik.
4. Sebuah organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan atau *non-profit organization* (Parsudi, 1993:1).

Menurut konsep pengembangan masyarakat, organisasi sosial/LSM diharapkan mampu melakukan peranan-peranan sebagai fasilitator, pendidik, teknisi dan advokator, (Jim Ife, 1995: 223). Sebagai fasilitator, organisasi sosial harus dapat melakukan pengorganisasian, kesepakatan, mediator, pemberi dorongan, animasi sosial, dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan keahlian dan sumber-sumber yang ada pada masyarakat yang bersangkutan.

Sebagai pendidik, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penyuluhan, menjadi penengah pada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang bersangkutan dan memberi pelatihan, dalam arti

bukan sebagai pelatih tetapi membantu kelompok menemukan seseorang yang dapat memberi pelatihan yang dibutuhkan.

Sebagai teknisi (dalam hal ini pengetahuan teknis) dapat melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dapat mempresentasikan, melakukan manajemen dan pengendalian dana.

Sebagai advokator, dapat membagi pengalaman, membentuk jaringan kerja, bertindak sebagai penghubung masyarakat dengan lembaga di luar masyarakat, dapat menggunakan media advokasi dan sumber-sumber daya manusiawi/alam.

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, pelayanan yang diberikan Orsos/LSM seharusnya juga menjadi perhatian utama. Peran Orsos/LSM tidak lagi bersifat karikatif, tetapi lebih mengutamakan penggalan potensi untuk dapat memberdayakan kelompok masyarakat yang memerlukan pertolongan. Seperti dikemukakan oleh Ginandjar Kartasasmita (1996) bahwa upaya pemberdayaan mencakup 1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) ; 2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); 3) mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena ketidak-berdayaan dalam menghadapi yang kuat dengan memberikan perlindungan dan pemihakan. Dasar pandangan mengenai pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan rakyat.

III. ORGANISASI SOSIAL DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

Propinsi Sumatera Selatan memiliki sejumlah 214 orsos/yayasan dan organisasi desa (Ordes), di antaranya 136 orsos/yayasan berada di kotamadya Palembang, 17 orsos/yayasan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 16 orsos/yayasan di Kabupaten Musi Banyuasin, 15 orsos/yayasan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 8 orsos di Kabupaten Muara Enim, 14 orsos di Kabupaten Lahat, 8 orsos/yayasan di Kabupaten Musi Rawas, dan 107 ordes di seluruh propinsi Sumatera Selatan.

Dari sejumlah Orsos/yayasan/ordes yang ada tersebut, 4 di antaranya coba dikaji dalam tulisan ini, yaitu Orsos Danila, Ordes Kenanga, LSM Putra Desa dan Ordes Sakia Kirti.

Ke empat orsos/yayasan/ordes tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Secara rinci untuk setiap orsos/yayasan/ordes diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi Sosial Danila

Orsos Danila terletak di Kelurahan 13 Ilir Palembang, yang secara geografis terletak di pinggir sungai Musi. Penduduk di Kelurahan ini berjumlah ± 4.304 jiwa yang terdiri dari 868 KK. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Bila dilihat dari angkatan kerja, sejumlah ± 1.604 orang yang bekerja, di antaranya pekerjaan mereka adalah: buruh (800 orang), tukang becak (200 orang), pensiunan PNS (35 orang), pembantu rumah tangga (165 orang), wiraswasta (200 orang), PNS (37 orang), dan pertukangan (167 orang). Sementara tingkat pendidikan penduduk kebanyakan adalah tidak tamat SD (600 orang).

Luas wilayah Kelurahan 13 Ilir ± 8,5 ha, dengan pemanfaatan tanah hanya untuk perumahan dan pekarangan. Karena letaknya di pinggir sungai, maka apabila air pasang, sebagian wilayah kelurahan di bagian utara tergenang air sehingga berdampak pada kesehatan lingkungan. Sementara dari masyarakatnya sendiri masih terlihat kurangnya kesadaran akan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Hal ini tampak dari kondisi bangunan tempat tinggal mereka yang kurang terawat dan masih ada yang tinggal di kolong-kolong rumah.

Transportasi dari dan ke lain kelurahan tersedia dengan mudah, baik transportasi melalui darat maupun air. Begitu pula dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, sarana kesehatan dan sebagainya, mudah dijangkau.

Orsos Danila bermula dari organisasi desa yang memulai kegiatannya sejak tahun 1980. Kegiatannya waktu itu masih bermula dari kegiatan individu (Ibu Hajjah Fauziah, pendiri sekaligus pengelola orsos hingga sekarang) yang coba menerapkan kegiatan sosialnya melalui kegiatannya sebagai seorang PSM di wilayahnya. Kegiatan sosialnya antara lain membentuk pengajian, arisan, amal kematian dan kegiatan anak yatim. Karena kemampuan dana terbatas, kegiatannya hanya bersifat sederhana (lingkup kecil).

Pada waktu itu H. Fauziah melihat di lingkungan tempat tinggalnya merupakan daerah yang rawan sosial. Kehidupan masyarakatnya kebanyakan miskin. Kebanyakan mereka adalah kaum pendatang dan bekerja sebagai buruh pasar, yaitu pasar 13 Ilir, Palembang. Warga masyarakat di lingkungannya, umumnya tinggal di

rumah-rumahan sewaan yang kondisi perumahannya tidak memungkinkan untuk ditempati (tidak layak huni), karena mereka umumnya hanya mampu tinggal di tempat-tempat seperti itu.

Dengan adanya minat yang besar dan kesadaran yang tinggi dari H. Fauziah, maka Kanwil Depsos Propinsi Sumatera Selatan pada waktu itu, terus mendorong dan membimbing tumbuhnya suatu wadah bersama yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat atau melaksanakan kegiatan UKS secara lebih sehat, terkoordinasi dan terarah. Hasil dari pembinaan dan motivasi serta dukungan pelatihan yang diberikan Kanwil Depsos, Propinsi Sumatera Selatan, maka dibentuklah ORSOS sesuai arahan dan petunjuk.

Lingkup kegiatannya meliputi seluruh warga kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I. Dengan makin bertambahnya kegiatan, maka jangkauan binaannya pun semakin meluas hingga keluar kelurahan. Usaha yang dilaksanakan selama ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui upaya pemberdayaan bersama dengan pemerintah; meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan non formal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Ordes Danila berupaya untuk menjadikan organisasinya sebagai yayasan. Akhirnya pada tanggal 28 maret 2002 Ordes Danila disahkan melalui akte notaris no. 137 tahun 2002, menjadi Yayasan Danila. Bersamaan dengan terbentuknya Yayasan Danila, disusun pula struktur organisasi yang membantu kelancaran tugas-tugas pelayanan, yaitu terdiri dari : Lurah 13

Ilir sebagai pembina Yayasan, ketua, penasehat, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu ada seksi-seksi yang langsung berhubungan dengan binaan, yaitu : seksi fakir miskin, seksi peranan wanita, seksi UEP, seksi lansia, dan seksi anak terlantar.

Dengan meningkatnya organisasi ini menjadi ORSOS/Yayasan, gerak organisasi sudah lebih luas. "*Kemanapun Yayasan ini bergerak, orang akan lebih melihat, lebih punya arti dibandingkan dengan statusnya sebagai organisasi desa (ordes), tidak disepelekan orang*", begitu kata Ibu Hajjah Fauziah.

Saat ini setelah menjadi yayasan, Danila menjadi lebih berani untuk bergerak karena optimis dengan masa depan. Tampaknya mereka telah memiliki aset yang cukup dengan donatur yang lebih pasti, sehingga dapat menentukan program dengan lebih baik dan lebih mantap. Dengan kemajuan ini Danila optimis, dapat melanjutkan usahanya tanpa bantuan dari pemerintah sekalipun. Sedangkan penggunaan juklak orsos yang berasal dari dinas sosial, masih tetap digunakan karena Danila menganggap itu adalah acuan dalam setiap tindakan.

2. Organisasi Desa (ORDES) Kenanga

Ordes Kenanga terletak di kelurahan 12 Ulu Palembang, yang secara geografis juga terletak di tepi sungai Musi. Penduduknya berjumlah ± 11.067 jiwa yang terdiri dari 3.225 KK dan sebagian besar beragama Islam. Penduduk angkatan kerja berjumlah ± 5.874 orang dengan jenis pekerjaan antara lain: Buruh (2.557 orang), tukang becak (152 orang), supir (32 orang), pekerja sektor informal (675 orang), pengemudi ketek/perahu (54 orang), pegawai swasta (472 orang), wiraswasta

(370 orang), PNS (19 orang), termasuk pengangguran (1.543 orang).

Wilayah kelurahan 12 Ulu mempunyai luas 20 ha, dengan pemanfaatan tanahnya untuk perumahan dan pekarangan semata. Sebagian rumah penduduk berada di atas air, begitupun bila ada air pasang, air semakin masuk ke beberapa wilayah bagian utara kelurahan ini. Tampaknya kesadaran penduduk akan kebersihan dan kesehatan lingkungan terlihat masih kurang. Kondisi tempat tinggal penduduk masih sangat sederhana. Namun jangkauan untuk keluar kelurahan sangat mudah, begitupun dengan keberadaan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, sarana kesehatan, sudah tersedia.

Ordes Kenanga berdiri tahun 1998 yang berkedudukan di Kelurahan 12 Ulu Kotamadya Palembang. Pendirian Ordes ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang dilaksanakan oleh Ibu Hamidah Nangtjik, yang pada waktu itu juga sebagai PSM di kelurahan ini.

Dibantu dengan beberapa teman di wilayah kelurahan ini, Ibu Hamidah menjadi penggerak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk membina, mengembangkan, memelihara dan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan ini.

Melihat minat yang besar dan kesadaran yang tinggi dari ibu Hamidah dan teman-temannya, maka Kanwil Departemen Sosial propinsi Sumatera Selatan pada waktu itu, terus mendorong dan membimbing kegiatan mereka ke arah tumbuhnya suatu wadah yang berfungsi sebagai partisipasi

masyarakat dalam melaksanakan UKS secara terkoordinatif dan terarah. Hasil dari pembinaan dan motivasi yang tinggi serta dukungan pelatihan yang diberikan Kanwil Departemen Sosial Sumatera Selatan, maka terbentuklah organisasi sosial tingkat kelurahan yang diberi nama Organisasi Desa (ORDES) Kenanga.

Bersamaan dengan terbentuknya Ordes, kepengurusanpun disusun sebagai berikut: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara. Selain itu untuk kelancaran tugas pengurus dalam melaksanakan pelayanan kepada binaan, dibentuklah beberapa badan pembantu yang membidangi, yaitu seksi UEP, seksi peranan wanita, seksi pelayanan anak dan lansia, seksi kesehatan dan lingkungan hidup, serta seksi kerohanian. Sebagai pelindung dan penasehat Ordes Kenanga, juga dipilih Dinas Kesejahteraan Sosial Tk I dan Tk II Palembang, kelurahan 12 Ulu dan ketua LKMD kelurahan 12 Ulu Palembang.

Hingga saat ini sasaran pelayanan Ordes Kenanga adalah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ordes Kenanga berupaya membina dan melayani sejumlah 15 anak binaan (program anak asuh), 30 anak terlantar (Program UEP), 30 orang lansia (Program Kesehatan Gizi) dan 150 orang fakir miskin (Program UEP dengan pendekatan KUBE). Selain pembinaan Ordes Kenanga juga memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, peralatan usaha, bantuan peningkatan gizi dan bantuan modal usaha.

Demikian, meskipun statusnya masih terdaftar di Dinas Kesejahteraan Sosial Palembang, namun kegiatan pelayanannya sudah menjangkau

berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Menurut Ketua Ordes, dalam waktu dekat ini ada upaya untuk menjadikan Ordes sebagai Yayasan, dengan harapan jangkauan pelayanan bisa lebih luas.

3. Yayasan Putra Desa

Yayasan Putra Desa (YPD) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan di daerah perkotaan dan pedesaan. YPD ini didirikan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Yayasan ini didirikan dengan dasar akte notaris no. 78, tanggal 13 Agustus 1998, dan terakhir diperbaharui dengan akte no. 03, tanggal 3 Juni 1997. Selain itu status YPD juga terdaftar pada Direktorat Sosial Politik Tk I propinsi Sumatera Selatan, dan Direktorat Sosial Politik Departemen Dalam Negeri R.I. di Jakarta tahun 1997.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanannya, YPD membentuk kepengurusan yayasan, yang dibagi atas dewan pengurus dan pelaksana harian. Dalam dewan pengurus ada ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan pelaksana harian terdiri dari direktur eksekutif, sekretaris, divisi program pengembangan SDM, divisi program pengembangan masyarakat, divisi administrasi/keuangan, divisi anak, dan staf (administrasi dan lapangan). YPD juga memiliki tim pelatih yang personilnya di luar kepengurusan organisasi itu sendiri.

Yayasan Putra Desa memulai kegiatan resminya tahun 1999, dengan program pendekatan terhadap anak, bekerjasama dengan Dinas

Kesejahteraan Sosial di wilayah Karang Anyar, Palembang. Sasarannya lebih kurang 40 anak terlantar yang ada. Ternyata permasalahan di wilayah tersebut tidak semata masalah anak terlantar. Tahun 2000 yayasan mengadakan survey secara menyeluruh di wilayah Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Hasilnya ternyata kondisi wilayah tersebut sangat memprihatinkan pada segala bidang, ekonomi, pendidikan, sosial dan lingkungan.

Dari data yang terhimpun, gambaran penduduk di wilayah ini adalah sebagai berikut: secara keseluruhan jumlah penduduk ada 9.073 jiwa dengan penduduk usia produktif (> 15 tahun) sebanyak 4.858 jiwa. Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk usia kerja, kebanyakan adalah sebagai buruh/jasa (1.027 orang), sedangkan pekerjaan lainnya adalah PNS (98 orang), pensiunan ABRI/sipil (40 orang), ABRI (9 orang), petani (85 orang). Kondisi perumahan penduduk umumnya tidak layak huni/ pemukiman kumuh yaitu ada sebanyak 848 unit perumahan, sedangkan lainnya ada rumah semi permanen (619 unit) dan rumah permanen (327 unit).

Dilihat dari kondisi wilayah sasaran pelayanan Yayasan ini, meskipun letaknya di kota, namun secara fisik tertinggal informasi, sumber daya manusia yang ada, sulit untuk berkembang, tempat tinggal masyarakatnya pun tampak tidak layak huni. Rumah-rumah yang mereka tempati terletak di atas air, yang dapat dikatakan kotor. Belum lagi bau yang ditimbulkan dari limbah pabrik yang ada di lingkungan wilayah ini. Di dalam wilayah ini terdapat 4 buah pabrik cukup besar, yaitu pabrik karet, tekstil, kecap dan roti.

Dengan kondisi lingkungan seperti ini, kondisi kesehatan penduduknya hampir dapat dikatakan kurang memenuhi syarat kesehatan. Tingginya angka anak terserang penyakit kulit, diare, demam mencapai 90 %. Belum lagi kondisi air bersih/MCK yang tidak memadai.

Pada awal kegiatannya, Yayasan Putra Desa bergerak di bidang pertanian. Mereka mencoba memajukan masyarakat melalui usaha pertanian. Yayasan memberikan berbagai pelatihan melalui usaha tani ini untuk mengembangkan SDM yang ada. Upayanya antara lain menggali kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, bagaimana mengembangkan usaha, pembentukan kelompok hingga kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Upaya ini tampaknya mendapat tanggapan yang cukup baik dari masyarakat.

Setelah melihat perkembangan masyarakat, Yayasan mencoba upaya lain dengan melakukan survey lebih dahulu. Berdasarkan survey itu, yayasan mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya, titik masuk program adalah anak, namun sasaran kegiatannya melibatkan seluruh warga wilayah tersebut.

4. Organisasi Desa (ORDES) Shakyakirti

Latar belakang terbentuknya organisasi sosial Tk Desa Shakyakirti ini diawali dari organisasi kepemudaan yang menampung para remaja dan merupakan sanggar keterampilan dengan nama Bina Karya Muda. Kegiatannya waktu itu didukung oleh Seksi Pemuda dan Olahraga serta Seksi Pendidikan/Penerangan LKMD Desa Alang Lebar. Kegiatan mereka adalah membantu Kepala Desa dalam

menggerakkan sosial kepemudaan untuk mengatasi remaja putus sekolah dan anak-anak keluarga kurang mampu. Mereka dibina melalui sanggar keterampilan tersebut dan hasil karya mereka biasanya dipamerkan pada pameran-pameran yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan, Kabupaten hingga Propinsi pada setiap tahunnya.

Dari tahun ke tahun kegiatan terus berjalan, walau kadang mengalami kemunduran karena para pengelola terhambat dengan tugas-tugas pribadinya. Namun organisasi ini tetap berjalan sesuai fungsi sosialnya, hingga akhirnya pada tahun 1996 setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kanwil Departemen Sosial Propinsi Sumatera Selatan, organisasi ini membentuk wadah Organisasi Desa (Ordes) Shakyakirti. Organisasi ini terdaftar di Kanwil Depsos Sumatera Selatan dengan nomor pendaftaran 101/V-4/ordes/STT/IV/1997 yang kepengurusannya terdiri dari ketua umum, ketua I, ketua II, sekretaris, bendahara. Bidang-bidang yang ada yaitu bidang UKS dan data PMKS, bidang rehabilitasi sosial dan pendidikan/trampil, serta bidang usaha ekonomis produktif.

Ordes Shakyakirti mengawali kegiatannya dengan mengadakan pendataan di wilayah kelurahan Alang Lebar ini. Hasil pendataan tersebut adalah sebagai berikut: jumlah penduduk ada sekitar 14.306 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 3.359. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai buruh/jasa (1.328 orang), sedangkan lainnya bekerja sebagai PNS/ABRI (965 orang), petani/dagang (753 orang), wiraswasta (453 orang), dan pensiunan (231 orang).

Pada saat pendataan, organisasi ini melihat adanya berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami penduduk, antara lain wanita rawan sosial ekonomi, keluarga kurang mampu, remaja putus sekolah, anak yatim dan keluarga berumah tidak layak huni. Adanya permasalahan inilah yang pada akhirnya mendorong Ordes Shakyakirti untuk turut andil dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan potensi serta peran masyarakat dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial secara mandiri dan swadaya. Sejak itu mulailah Ordes Shakyakirti melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya.

IV. KESIMPULAN

Pada masyarakat modern yang telah maju, pemberdayaan lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju, sekaligus menanamkan pengertian bahwa suatu saat wajib membantu yang lemah untuk lebih maju. Sedangkan untuk masyarakat yang masih tertinggal, pemberdayaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin pula adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dan yang lemah serta belum berkembang.

Dari pengalaman organisasi sosial selama ini, tampaknya setiap upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*).

Dalam pelaksanaannya ternyata penerapan konsep pemberdayaan pada Orsos/LSM dipengaruhi oleh kondisi dasar daerah dan masyarakat, seperti potensi alam, potensi ekonomi pasar, kondisi prasarana, kemampuan sumber daya manusia, dan kelembagaan sosial daerah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial R.I., *Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri R.I. dan Menteri Sosial R.I. , Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Direktorat Bina Organisasi Sosial, Jakarta, 1993.*
- Departemen Sosial R.I., *Pemberdayaan Dampak Krisis. Jakarta, 1999.*
- Departemen Sosial R.I., *Menuju Masyarakat yang Berketahanan Sosial : Pelajaran Dari Krisis. Jakarta, 1999.*
- Departemen Sosial R.I., *Pengkajian dan Uji Coba Standardisasi Panti Sosial Bina Daksa. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 1995.*
- Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial R.I., *Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Nomor : 193/Menkes-Kesos/SK/ III/2001 tentang Standardisasi Panti Sosial.*
- Roebyantho, Haryati. *Pengelolaan Organisasi Sosial Di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Departemen Sosial R.I., Badan Litbang Kesejahteraan Sosial, 1997.*
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.*